



PEMERINTAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA – SKPD)

TAHUN 2022



DINAS SOSIAL

KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033

LARANTUKA

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	5
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	5
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja	6
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	9
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	9
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	10
3.3 Program dan Kegiatan	11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	14
BAB V PENUTUP.....	15
LAMPIRAN DAFTAR TABEL	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaannya sehingga Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Renja merupakan kebijakan pembangunan tahunan yang memuat kerangka prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Dokumen tersebut telah ditetapkan oleh Bupati Flores Timur nomor : 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijadikan acuan dan pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta sebagai landasan penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2022. Renja ini disusun melalui sebuah proses yang cukup panjang sejak perumusan rencana awal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten di Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2021.

Dalam konteks yang demikian Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini dibuat sebagai rancangan awal sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah dalam membangun daerah ini kedepan, khususnya dalam Urusan Sosial yang merupakan tupoksi dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Meskipun Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini telah berhasil disusun, namun tetap terbuka bagi siapa saja untuk memberikan kritikan yang kiranya akan mencapai kesempurnaan dalam pelaksanaannya di masa mendatang.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) SKPD memberikan informasi / gambaran kepada Pemerintah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberkati kita semua.

Larantuka, 01 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,


ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19670420 199703 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 adalah melaksanakan upaya-upaya pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat mempunyai Visi “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG BAHAGIA DAN SEJAHTERA ” dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas Karang Taruna dalam mendukung pencapaian visi Bupati Flores Timur “Selamatkan Orang Muda Flores Timur”;
2. Optimalisasi peran Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam mendukung capaian kinerja organisasi;
3. Meningkatkan pelayanan untuk pemenuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Merevitalisasi peran panti dalam upaya peningkatan kapasitas pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam upaya mencapai visi dan misinya sangat tergantung pada sumber daya manusia yang berkualitas, dan didukung dengan dana serta sarana prasarana yang tersedia.

Rencana Kerja (RENJA) 2022 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam upaya pengintegrasian dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf “b” bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 55 ayat

(6), bahwa “Apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, visi, misi dan program menjadi dokumen resmi daerah”. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, Renstra OPD harus memperhatikan hasil evaluasi pencapaian Renja OPD sebelumnya yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah dokumen kerja Dinas/OPD untuk masa kerja 1 (satu) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa satu tahun tersebut OPD berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD ini adalah mengaplikasikan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga, diharapkan tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dengan demikian dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Sosial, Kabupaten Flores Timur serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama satu tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I memuat pendahuluan mencakupi latar belakang penulisan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta serta sistematika penulisan
- Bab II memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan renja dan penelaahan terhadap usulam masyarakat
- Bab III memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, serta Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD. baik jenis program/kegiatan. pagu indikatif. maupun kombinasi keduanya
- Bab IV memuat uraian penjabaran dari tabel program dan kegiatan
- Bab V penutup

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2020 dan capaian renstra sampai dengan triwulan ke 2 tahun 2021.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : (a) realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (b) realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan (c) realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sampai dengan triwulan 2 Tahun 2021 dapat diuraikan pada Tabel TC.29.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja merupakan suatu alat ukur bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur yaitu Capaian SPM/Standar Nasional dan IKK dapat ditunjukkan pada Tabel TC.30:

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan sosial pada tingkat pemerintah provinsi. Analisis isu - isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan -

langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Tingginya jumlah PMKS.
- 2) Kurangnya sarana sosial / penampungan sementara / rumah singgah / tempat rehabilitasi PMKS.
- 3) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan PMKS.
- 4) Adanya mental yang salah, yaitu mental suka diberi bantuan pada diri sebagian besar PMKS.
- 5) Rendahnya akses informasi dan pelayanan pemerintah yang dapat dijangkau oleh PMKS karena keterbatasan teknologi yang dimiliki.
- 6) Masih Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Belum Mendapat Perhatian dari Pemerintah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Renja

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi

dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 terdapat 1 (satu) Program Urusan Penunjang dan 5 (lima) Program Urusan Sosial yang menjadi tanggung jawab sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Urusan Pemberdayaan Sosial;
3. Program Urusan Rehabilitasi Sosial;
4. Program Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Urusan Penanganan Bencana

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Flores Timur serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur maka pada tahun 2022 program dan kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022. Hal ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2022 dimana didalamnya terdapat 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang secara umum dapat digambarkan dalam Tabel TC. 31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2022 tentunya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stackholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terkait rencana pencapaian target RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Flores Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta

kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2022. Mengenai Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel TC. 32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan; dan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :
 - (a) Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 - (b) Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (c) Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (d) Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Flores Timur.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

VISI : Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur					
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Selamatkan Orang Muda Flores Timur	1.2 Terselamatkannya orang muda dari masalah sosial budaya	1.2.4 Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.2.4.1 Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	1.2.4.1.1 Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS
				1.2.4.2 Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial	1.2.4.2.1 Pendaayagunaan dan pemberdayaan lembaga sosial dalam Penanganan PMKS.

Dari tujuan dan sasaran renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur diatas, maka dapat ditentukan sasaran strategis dan indikator sasaran dinas sosial kabupaten flores timur, yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial :
 - a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
 - b. Persentase PMKS yang tertangani
 - c. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan sosial
 - a. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

- b. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
- c. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
- d. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
- e. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
- f. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

3.3 Program dan Kegiatan

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur.

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, maka program dan kegiatan prioritas tersebut merupakan hasil pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya dengan tidak merubah taget dan indikator kinerja dari program dan kegiatan.

Pada Rencana Kerja Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menjalankan 6 Program yang masing masing terbagi ke dalam 14 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan Pendukung yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari :

Kegiatan	Sub Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pemberdayaan Sosial
Terdiri dari :

Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Rehabilitasi Sosial
Terdiri dari :

Kegiatan	Sub Kegiatan
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Penyediaan Permakanan
	Penyediaan Alat Bantu
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Terdiri dari :

Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Bencana
Terdiri dari :

Kegiatan	Sub Kegiatan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
	Pelayanan Dukungan Psikososial
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. Program Penanganan Bencana
Terdiri dari :

Kegiatan	Sub Kegiatan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 berisi program dan kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berisi 6 (enam) program prioritas yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Pemberdayaan Sosial; (3) Program Rehabilitasi Sosial; (4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (5) Program Penanganan Bencana; dan (6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

. Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dapat dilihat dalam Tabel TC33 yaitu Tabel Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timurnya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Besar Harapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Untuk bisa menjawab berbagai tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dihadapkan pada berbagai permasalahan terutama sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembiayaan, dimana kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam Rencana Kerja (Renja) ini menyadari belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan sangat diharapkan masukan dalam bentuk usul saran untuk menyempurnakan Renja ini.

Demikianlah Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, 01 Oktober 2021

* Plt Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,


ANSELMUS YOMANES MARYANTO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19670420199703 1 008

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

[illegible]

Kode	Unitas/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Kegiatan dan Anggaran Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (s.d. 2021)			Target Program dan Kegiatan (Rencana Kegiatan dan Anggaran Daerah) Tahun 2021			Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkoan Daerah 04 Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021
1	06	04	2.01	03	Jumlah Panti Yayas Sosial yang mendapat Bantuan (Lembaga)	6 panti dan 4 LKS	6 panti	6 panti	6 panti	6 panti	11-12/04/2021	100%
1	06	04	2.01	03	Jumlah Lanjut Usia Panti yang mendapat Bantuan Rehabilitasi dan Perawatan sosial (orang)->	462 orang	210 orang	50 orang	241 orang	100 orang	451 orang	98%
1	06	04	2.01	03	Jumlah penyandang cacat dan disabilitas yang mendapat bantuan	88 Penyandang Disabilitas dan 88 Trauma	0	25 Penyandang Disabilitas dan 25 Trauma	0	25 Penyandang Disabilitas dan 25 Trauma	0	0
1	06	04	2.01	03	Jumlah Lanjut Usia Panti yang mendapat Bantuan Rehabilitasi dan Perawatan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Panti.	720 orang	0	0	0	100 orang	0	0
1	06	04	2.01	03	Jumlah anak sekolah yang mendapat bantuan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Panti.	80 orang	0	50 orang	0	200 orang	0	0
1	06	04	2.01	03	Jumlah anak sekolah yang mendapat bantuan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Panti.	322 orang	0	0	0	322 orang	0	0
1	06	04	2.01	03	Jumlah anak sekolah yang mendapat bantuan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Panti.	1000 orang	0	0	0	40 orang	0	0
1	06	04	2.01	03	Jumlah anak sekolah yang mendapat bantuan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Panti.	200 ODK	1 ODK	25 ODK	4 ODK	25 ODK	5 ODK	3%
1	06	04	2.01	03	Jumlah anak sekolah yang mendapat bantuan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Panti.	125 klien	52 klien	25 klien	13 klien	25 klien	118 klien	0,94%
1	06	04	2.01	03	Jumlah anak sekolah yang mendapat bantuan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Panti.	200 anak terdampak	7 orang	0	0	30 orang	3 orang	2%
1	06	04	2.01	03	Jumlah anak sekolah yang mendapat bantuan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Panti.	250 desa/kelurahan	250 desa/kelurahan	0	0	250 desa/kelurahan	250 desa/kelurahan	100%

Kode		Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan									
						Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)							
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2	15432 orang	12.210 orang	5	6	12.419 orang	11.639 orang	7	3=7(16)	9	10= (5+7+9)	11= (10+4)	0
1	06	06			Program Penanganan Bencana													
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota													
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan		10000 orang	19 ton beras/17970 orang			2000 orang	6.000 kg Beras		100%	2000 orang	1082 orang		10,82%
												Bantuan untuk 35 KK (Bencana kebakaran 13 KK, Bencana Angin Kencang 4 KK, Bencana Sosial/PMKS Lainnya 18 KK), 132.300 ton Beras IPS Korban Covid- 19						
1	06	06	2,01	02	Penyediaan Sandang													
1	06	06	2,01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi													
1	06	06	2,01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan													
1	06	06	2,01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial													
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiaptiagaan Bencana Kabupaten/ Kota													
1	06	06	2,02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana		24 kasus	4 unit			2 kasus	2 kasus		100%	4 kasus	6 kasus		25%
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tahun Siaga Bencana		41 orang TAGANA	41 orang TAGANA			41 orang TAGANA	41 orang TAGANA		100%	41 orang TAGANA	41 orang TAGANA		100%
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan													
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota													
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota		5 lokasi	1 lokasi			1 lokasi	1 lokasi		100%	1 lokasi	1 lokasi		100%

Tabel 2.2 TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	6,25%	6,70%	6,77%	3,2%		6,77%	
2	Persentase PMKS yang tertangani		Persentase PMKS yang tertangani	6,25%	6,70%	6,77%	3,2%		6,77%	
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	65,45	65,55	65,65	33		65,65	
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau sosial ekonomi sejenis lainnya		Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	85,35	85,45	85,55	60		85,55	
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	45	50	55	60		55	
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM); yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	0,3	0,4	0,5	0		0,5	
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100%	100%		100%	
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	100%		100%	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional		Jumlah	Target Rencana SPPTD				Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2022	Catatan Akhir
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Persentase penyandang cacat fisik dan mental dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	2		4	5,24	5,24	5,24	3,5			5,24	

TABEL 2.3
Review terhadap Perubahan RPKD Tahun 2021
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6					
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				4.836.972.460					5.356.184.400
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2.649.497.790	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2.710.230.400
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		2.649.497.790	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	2.710.230.400
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100				Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	
			Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	100				Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dokumen)	8	
	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	8	30.000.000	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)		30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	8	30.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8	2.033.572.790	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.032.640.800
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (bulan)		1.987.240.790	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali)	14	1.987.240.800
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	Tersedianya jasa administrasi keuangan (orang)	12	46.332.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka (OPD)	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	12	45.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	6	186.200.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				154.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Larantuka	4 Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Alat kelistrikan) (jenis)	5 5	6 3.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Alat kelistrikan) (Komponen)	6 6	2.300.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	12	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	2	15.000.000
		Larantuka	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	2	22.000.000			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	2	25.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka	Tersedianya alat Kebersihan Kantor (jenis)	2	4.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Tersedianya alat Kebersihan Kantor (jenis)	12	4.500.000
		Larantuka	Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	18	25.000.000			Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	35	19.500.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	35	16.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	40.000	16.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Larantuka	Jenis Bahan Bacaan yang disediakan (Bulan)	30.000	1.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Larantuka (OPD)	Jenis Bahan Bacaan yang disediakan (Jenis/Bulan)	2	1.200.000
	Facilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka	Tersedianya makan dan minum kantor (orang)	12	24.000.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Tersedianya makan dan minum kantor (Orang makan snack)	250	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	250	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	100	55.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	35	336.725.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		381.350.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar Materai dan Perangko)		2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar Materai dan Perangko)	150	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	Tersedianya jasa komunikasi, sumber dayair dan listrik (bulan)	150	55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Tersedianya jasa komunikasi, sumber dayair dan listrik (bulan)	12	61.950.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang dibiayai (Orang)	12	279.725.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	23	317.400.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112.239.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23	63.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka	Tertindakannya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/ operasional (unit)		8.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Jasa Perizinan (Unit)	16	30.000.000
		Larantuka	Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional (unit)	11	40.000.000			Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara (Unit)	16	43.239.600
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (unit)	11	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	35.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka	Tertindakannya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	1	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Tertindakannya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	5	4.000.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			30	2.187.474.670	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				2.645.954.000
	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)		1.385.000.000	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)	100	1.795.580.000
			Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan (%)	100				Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan (%)	97,43	
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			100	105.000.000	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				48.750.000

Hasil Analisis Kebutuhan										
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	3 Desa Aransina Kec. Tanjung Bunga	4 Jumlah KK Warga KAT yang didampingi (KK)	5	6 25.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Desa Aransina Kec. Tanjung Bunga, Desa Tanawerang Kec.Solor Timur	Jumlah KK Warga KAT yang didampingi (KK)	20	25.000.000
		Desa Nelaamawangi Kec. Ilciboleng, Desa Bubuatagamu Kec.Solor Selatan	Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan (rumah adat)	20	80.000.000		Tobilota	Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan (rumah adat)	1	15.750.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)	2	1.280.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)		1.754.830.000
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		- Jumlah fakir miskin yang diberdayakan (Orang)		350.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	- Jumlah fakir miskin yang diberdayakan (Orang)	100	35.200.000
			- Jumlah Kube yang diberdayakan (Kube)	16.000	380.000.000		Desa Lewolukok, Desa Lewomuda, Desa Lamika, Teneden, desa Likutuden, Desa Kawalelo, Desa Blepenawa Kec Demong Pagong, Desa Riang Baring, Desa Riang Rita, Desa Nurabelen, Desa Nobo, Desa Dulipali, Desa Tenawahang, Desa Duli Jaya, Desa Tuatapa, Riangwulu , Desa Boru,	- Jumlah KUBE yang diberdayakan (KUBE)	65	750.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Keberhasilan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6		Desa Tukalepa, Desa Tiwotobi, Desa Bandosa, Desa Wailolong, Desa Bantala, Desa Ile Padung, Desa Baluk Herin, Desa Paimung, Desa Baluweling, Kecamatan Winthama - Kd. Lewolere, Desa Lewomada, Desa Lamika, Desa Waiwurak, Kel. Waiwerang, Ruang Nyir dan Tabuli - Kd. Sawotari			
		Desa Dayong Kec. Klugagala, Osetova Kec. Winthama, Kembung Sepatu, Kec. Solor Selatan, Lolon Kuma, Kec. Solor Barat, Thasiba, Kec. Laramaka, Seroja, Kec. Ile Mandiri		4 Panti						
	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	6 Panti	528.574.670	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	100	483.574.000
			Persentase pemangangan penyandang disabilitas (%)	100				Persentase pemangangan penyandang disabilitas (%)	7	
			Cakupan pelayanan panti asuhan yang difabel (Orang)	7				Cakupan pelayanan panti asuhan yang difabel (Orang)	52	
			Persentase obit penyandang penyakit sosial yang ditangani (%)	322				Persentase obit penyandang penyakit sosial yang ditangani (%)	12	

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2	3	4	5	6					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)	12	447.374.670	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)	386.374.000	
Penyediaan Permukiman	Wihama, Demong, Adonara Barat, Solor Timur, Ile boleng	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan bantuan permukiman (orang)		109.999.890	Penyediaan Permukiman	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan bantuan permukiman (orang) → Bantuan Miskin	50	176.374.000
	Adonara Barat, Renuadiri, Solor Barat, Larantuka	Jumlah Panti Yoyasan Sosial yang mendapat bantuan permukiman (Lembaga)	50	166.375.000		19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah Panti Yoyasan Sosial yang mendapat bantuan permukiman (Lembaga)	10	
Penyediaan Alat Bantu	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan bantuan Alat Bantu (orang)	10	54.999.780	Penyediaan Alat Bantu	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan bantuan Alat Bantu (orang) → Alat Bantu	50	58.000.000
	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan Alat Bantu (orang)	20				Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan Alat Bantu (orang)	50	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Bali, Sola, Kupang	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapat Bantuan Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10	68.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Flores Timur dan Laut	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapat bantuan Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	100.000.000
	Panti Jompo Pada Wan Mamere	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial (orang)	10			Pusat dan 10 KKK	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan bantuan Pelayanan dan Rehabilitasi (orang) → Bantuan Miskin dan Bantuan Sosial	50	

Rancangan Awal RKPD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Hasil Analisis Kebutuhan				
						Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indika
1		Titehena, Adonara Timur, Tanjung Bunga	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya (orang)	5	5		19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya (orang)	150	
		4 kecamatan (6 panti asuhan)	Jumlah pengurus panti yang diberikan pelatihan keterampilan (orang)	150			4 kecamatan (6 panti asuhan)	Jumlah asuhan yang diberikan pelatihan keterampilan (orang)	322	
								Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)	50	
	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Witihama, Solor Barat, Demon pagong, Ile mandiri, Ile boleng, Tanjung Bunga	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan (orang)	5	20.000.000	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Tersebar di 19 Kec.	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang) → Pelayanan Administrasi Kependudukan	50	20.000.000
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	19 kecamatan (250 desa/kelurahan) Naimatan (Kupang)	Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) (orang)	50	30.000.000	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Flores Timur dan Luar Kabupaten Flores Timur	Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) (orang)	5	30.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial				82.500.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti				70.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Larantuka	Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS / Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana (orang)		82.500.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Larantuka	Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS / Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana (Klien/orang)	30	70.000.000
		19 Kecamatan	Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)	30						

Rencana Kerja Anggaran RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	25	114.600.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	25	114.600.000
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	2	33.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	2	33.000.000
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)		33.000.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	20	33.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			10	81.600.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				125.000.000
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Dokumen)		26.600.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Dokumen)	1	30.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan PKH (Orang)	1	55.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19 kecamatan (250 desa/kelurahan)	Tindakannya koordinasi pelaksanaan PKH (kali)	2	75.000.000
	Program Penanganan Bencana		Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	11.641	147.500.000	Program Penanganan Bencana		Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	100	129.000.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)		120.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)		170.000.000
	Penyediaan Makanan	Sesuai Kejadian	Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan makanan (orang)		55.000.000	Penyediaan Makanan	19 Kecamatan (sesuai kejadian)	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang) -> Makanan	500	70.000.000
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Sesuai Kejadian	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Penanggulangan Khusus (orang)	20.250	40.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	19 Kecamatan (sesuai kejadian)	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang) -> Penanggulangan Khusus	70	50.000.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah orang yang mendapat pelayanan Dukungan Psikologis (orang)	70	25.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	19 Kecamatan (sesuai kejadian)	- Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang) → Dukungan Psikologis	50	50.000.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota			50	27.500.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota				59.000.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Larantuka	Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi (lembaga)		27.500.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Desa Duablolong, Desa Pledo, Desa Oyang Barang, Desa Ile Padung, Desa Sinar Hading, Desa Lewobele, Desa Lamatutu, Desa Kolaka, Desa Adabang, Desa Nurabelen	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk (KSB)	10	50.000.000
		Desa Peledo, Dua Blolong, Oyang Barang, Kolaka, Lamatutu, Adabang, Nuri, Sinar Hading, Ile Padung, Lewobelen	Jumlah Pendampingan Kampung Siaga Bencana (KSB)	1	50.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Larantuka - Ibukota Kabupaten.	Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi (lembaga)/ Orang	42	9.000.000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			10	10.500.000	Program Pengelolaan Taman Makam				15.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota		Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah (lokasi)		10.500.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota				15.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Larantuka	Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah (monumen)		10.500.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Larantuka	Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah (lokasi)	1	15.000.000